

FILOSOFI LAUT MALUKU DALAM PARADIGMA BLUE ACCOUNTING

Oleh:

¹Muh. Ziaul Haq Bakri, ²Ulfa Rabiyyah, ³Nur Hikmah Helida Amahoru,
⁴Marannu Paledung

^{1,3,4}Universitas Pattimura

Jl. Jalan Ir. M. Putuhena, Kampus Poka, Ambon, Maluku. Kecamatan Teluk Ambon. 97131.

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara
Jl. Kumala No.24, Makassar, 90234

e-mail :ulfarabiyah.stietdn@gmail.com

ABSTRACT

The sea, as the lifeblood of Indonesian coastal communities, particularly in the Maluku Islands, plays a central role in economic, social, and cultural aspects. Although the blue accounting paradigm offers a solution for integrating ecological and social dimensions in marine accounting reporting, many practices still focus on a technocratic approach that tends to ignore local values. This study aims to develop a blue accounting paradigm based on the local wisdom of the Maluku community, by exploring customary principles such as Sasi and Pela Gandong, which focus on ecological balance and sustainability. Through a reflective-philosophical approach, this study analyzes the ontological, epistemological, and axiological dimensions that shape the Maluku community's perspective on the sea. The findings indicate that the sea is not only viewed as an economic resource, but as a living entity containing moral and spiritual values. Therefore, blue accounting needs to accommodate these values in the reporting system to produce fairer and more sustainable accountability. This study also suggests the integration of local wisdom within national and international policy frameworks, as well as the importance of developing customary-based indicators to strengthen the sustainability of marine ecosystems.

Keywords: Blue Accounting, Local Wisdom, Sasi, Pela Gandong, Socio-Ecological Accounting.

ABSTRAK

Laut sebagai nadi kehidupan bagi masyarakat pesisir Indonesia, khususnya di Kepulauan Maluku, memegang peranan sentral baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Meskipun paradigma blue accounting menawarkan solusi untuk mengintegrasikan dimensi ekologis dan sosial dalam pelaporan akuntansi kelautan, banyak praktik yang masih berfokus pada pendekatan teknokratis yang cenderung mengabaikan nilai-nilai lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan paradigma blue accounting yang berbasis pada kearifan lokal masyarakat Maluku, dengan menggali prinsip-prinsip adat seperti Sasi dan Pela Gandong, yang memfokuskan pada keseimbangan ekologis dan keberlanjutan. Melalui pendekatan reflektif-filosofis, penelitian ini menganalisis dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang membentuk cara pandang masyarakat Maluku terhadap laut. Temuan menunjukkan bahwa laut tidak hanya dipandang sebagai sumber daya ekonomi, tetapi sebagai entitas hidup yang mengandung nilai moral dan spiritual. Oleh karena itu, blue accounting perlu mengakomodasi nilai-nilai ini dalam sistem pelaporan

untuk menghasilkan pertanggungjawaban yang lebih adil dan berkelanjutan. Penelitian ini juga menyarankan integrasi kearifan lokal dalam kerangka kebijakan nasional dan internasional, serta pentingnya pengembangan indikator berbasis adat untuk memperkuat keberlanjutan ekosistem laut.

Kata Kunci: *Blue Accounting*, Kearifan Lokal, Sasi, Pela Gandong, Akuntansi Sosial-Ekologis.

PENDAHULUAN

Laut memegang peran sentral bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, tidak hanya sebagai penopang ekonomi tetapi juga sebagai ruang hidup sosial dan kultural masyarakat pesisir. Paradigma ekonomi biru mendorong pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan, namun dalam praktiknya pengelolaan dan pelaporan aktivitas ekonomi kelautan masih didominasi cara pandang eksploitatif dan instrumentalis terhadap laut, terutama di tingkat komunitas pesisir yang pencatatannya cenderung sederhana dan belum menangkap nilai sosial ekologis ekosistem laut. Kondisi ini juga mulai tampak di berbagai wilayah timur Indonesia, sementara kebijakan nasional dan daerah menuntut adanya instrumen akuntabilitas yang mampu menyeimbangkan tujuan ekonomi dengan pelestarian lingkungan laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir (Robert Tambun *et al.*, 2025)

Akuntansi modern menghadapi tantangan besar ketika berhadapan dengan ruang hidup bahari yang rapuh namun menjadi tulang punggung ekonomi, terutama di wilayah kepulauan seperti Kepulauan Maluku. Dalam paradigma akuntansi konvensional yang berorientasi pada daratan, laut kerap direduksi menjadi sekadar faktor produksi atau objek eksploitasi sumber daya alam tanpa sensitif terhadap dimensi ekologis, sosial, dan spiritual yang menyertainya (Boswell, 2023). Keterbatasan ini telah mendorong lahirnya gagasan Blue Accounting sebagai suatu cara pandang baru yang berupaya mengakui, mengukur, dan melaporkan dampak aktivitas ekonomi terhadap ekosistem kelautan dan pesisir secara lebih utuh. Blue Accounting tidak hanya menempatkan laut sebagai ruang ekonomi, tetapi juga sebagai ruang etis dan kultural yang menuntut pertanggungjawaban antargenerasi atas pemanfaatan sumber daya maritim (Syah *et al.*, 2020).

Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, urgensi pengembangan paradigma Blue Accounting menjadi semakin mengemuka, mengingat besarnya ketergantungan masyarakat pesisir terhadap kesehatan ekosistem laut. Kepulauan Maluku merupakan salah satu locus penting bagi diskursus ini karena memiliki sejarah panjang sebagai ruang peradaban bahari sekaligus sebagai wilayah dengan kekayaan biodiversitas laut yang tinggi. Namun, di tengah narasi kekayaan tersebut, berbagai tekanan ekologis seperti eksploitasi sumber daya perikanan, degradasi lingkungan pesisir, dan ancaman terhadap keberlanjutan ekonomi lokal terus menguat. Dalam situasi demikian, kebutuhan akan suatu kerangka akuntansi yang mampu menjembatani aspek ekonomi, ekologi, sosial, dan kultural menjadi semakin mendesak.

Sejumlah penelitian terkini menunjukkan bahwa praktik blue accounting mulai diterapkan dalam berbagai konteks, penelitian (Amaliah *et al.*, 2024) yang mengungkap usaha wisata minat khusus di Teluk Tomini, sektor perikanan di Kutai Barat, maupun kelompok nelayan di berbagai daerah pesisir Indonesia. Studi lain dari (Helton Wira Nugraha R.A Umar *et al.*, 2024) mengkaji penerapan blue accounting pada pelaku usaha teripang laut di Desa Torosiaje dan pada kegiatan wisata pesisir yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip blue accounting dapat meningkatkan kesadaran keberlanjutan sekaligus berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat. Penelitian mengenai kearifan lokal sasi di Maluku menegaskan bahwa praktik adat tersebut mengandung prinsip pengaturan

akses, pengendalian eksploitasi, dan pemulihan ekosistem yang sangat selaras dengan semangat keberlanjutan dalam green/blue accounting, meskipun belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam kerangka akuntansi formal.

Di sisi lain, masyarakat Maluku memiliki beragam kearifan lokal yang telah lama berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan relasi manusia dan alam. Tradisi sasi, merupakan sistem larangan adat yang mengatur masa tutup buka pemanfaatan sumber daya tertentu di laut maupun darat, dengan tujuan menjaga keberlanjutan dan mencegah eksploitasi berlebihan. Praktik ini tidak sekadar teknis, tetapi sarat dengan nilai moral, spiritual, dan komunal yang menempatkan alam sebagai mitra hidup, bukan objek yang bebas dieksploitasi (Noya, 2023). Demikian pula nilai pela gandong yang menekankan ikatan persaudaraan lintas komunitas, mengandung potensi etis bagi pembentukan solidaritas ekologis dan tanggung jawab bersama dalam mengelola ruang laut. Kearifan lokal ini menunjukkan bahwa masyarakat Maluku telah mengembangkan suatu “arsip ekologis” yang hidup dalam praktik keseharian, ritual, dan norma sosial (Wakano *et al.*, 2019)

Namun demikian, peta literatur menunjukkan beberapa kesenjangan penting. Pertama, fokus kajian blue accounting masih didominasi kajian teknis mengenai pengukuran, indikator, dan pengaruhnya terhadap kinerja atau pendapatan, baik di tingkat korporasi, pemerintah daerah, maupun komunitas nelayan, dengan perhatian yang relatif terbatas pada dimensi filosofis dan kultural yang melatarbelakangi praktik akuntansi kelautan. Kedua, walaupun kearifan lokal seperti sasi di Maluku telah banyak dikaji dalam perspektif hukum adat, konservasi, dan green accounting, integrasinya sebagai basis konseptual untuk membangun paradigma blue accounting yang berakar pada ontologi, epistemologi, dan aksiologi masyarakat kepulauan masih jarang dieksplorasi secara sistematis. Ketiga, studi yang secara eksplisit mengkaji blue accounting dalam konteks filosofis Kepulauan Maluku sebagai ruang hidup maritim bukan sekadar lokasi studi kasus teknis masih sangat terbatas sehingga belum tersedia kerangka konseptual yang benar-benar kontekstual dengan karakter sosial-budaya Maluku.

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu upaya epistemologis dan filosofis untuk membangun paradigma Blue Accounting yang berakar pada kearifan lokal Kepulauan Maluku. Paradigma di sini dipahami sebagai kerangka berpikir yang memandu apa yang dianggap penting untuk dicatat, diungkap, dan dipertanggungjawabkan dalam praktik akuntansi, terutama terkait laut dan sumber daya pesisir. Menurut (Soselisa *et al.*, 2024) Mengintegrasikan kearifan lokal seperti sasi dan pela gandong ke dalam Blue Accounting berarti menggeser pusat perhatian dari sekadar pelaporan numerik menuju pelaporan yang mengafirmasi nilai kesaling-terhubungan (interconnectedness), keberlanjutan, dan keadilan ekologis. Dengan demikian, Blue Accounting tidak hanya menjadi instrumen teknis, tetapi juga praktik etis yang mengandung refleksi mendalam atas relasi manusia–laut dalam horizon budaya Maluku (Layn, 2024).

Berangkat dari gap tersebut, penelitian berjudul “Membangun Paradigma Blue Accounting Berbasis Kearifan Lokal: Refleksi Filosofis dari Kepulauan Maluku” menawarkan kebaruan dengan menjadikan kearifan lokal maritim Maluku seperti praktik sasi laut, pengaturan musim melaut, serta norma adat lain sebagai fondasi konseptual, bukan sekadar konteks ilustratif. Penelitian ini berupaya merumuskan paradigma blue accounting yang melihat laut sebagai ruang hidup dan subjek moral yang perlu “diakui” dalam sistem akuntansi, melalui refleksi ontologis tentang kedudukan laut, epistemologis tentang cara pengetahuan lokal dibangun, serta aksiologis tentang nilai moral yang mengikat relasi manusia–laut dalam budaya Maluku. Dengan demikian, kontribusi penelitian tidak hanya menyentuh dimensi teknis pelaporan, tetapi juga menawarkan kerangka berpikir alternatif yang dapat menjadi rujukan bagi pengembangan blue

accounting di wilayah kepulauan lain di Indonesia yang memiliki karakter sosial-budaya serupa.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengayaan wacana akuntansi sosial dan lingkungan melalui pengarusutamaan perspektif kepulauan dan kearifan lokal Nusantara, khususnya Maluku. Secara praktis, hasil refleksi filosofis ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan pelaporan dan pengelolaan sumber daya kelautan yang lebih akomodatif terhadap nilai-nilai adat dan spiritualitas lokal. Sementara itu, dari sisi metodologis, penggunaan systematic literature review diharapkan dapat memperlihatkan celah riset dan peluang pengembangan studi lanjutan, baik dalam bentuk penelitian empiris, etnografi akuntansi, maupun pengembangan model pelaporan Blue Accounting yang kontekstual di wilayah kepulauan (Hendarman *et al.*, 2024). Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjembatani dialog antara ilmu akuntansi, filsafat, dan kearifan lokal sebagai langkah menuju praktis akuntansi yang lebih adil bagi manusia dan laut di Kepulauan Maluku.

TINJAUAN PUSTAKA

Blue Accounting di Sektor Maritim.

Dalam literatur, blue accounting diposisikan sebagai pengembangan dari akuntansi lingkungan dan akuntansi keberlanjutan yang secara khusus berfokus pada ruang hidup laut dan pesisir sebagai aset ekonomi sekaligus ekologi yang harus dijaga lintas generasi (Rahmayanti and Sari, 2023). Melalui kerangka ini, informasi keuangan seperti investasi konservasi, biaya pemantauan kualitas perairan, atau pengeluaran untuk perlindungan terumbu karang diintegrasikan dengan data biogeofisik dan sosial, sehingga laporan tidak hanya menunjukkan kinerja laba, tetapi juga perubahan kondisi ekosistem, kapasitas daya dukung, serta dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat pesisir (Syah *et al.*, 2020)

Di sektor maritim Indonesia, blue accounting mulai dipraktikkan sebagai instrumen akuntabilitas publik yang menghubungkan kebijakan ekonomi biru dengan pelaporan kinerja BUMN dan entitas bisnis yang beroperasi di laut. Studi pada PT PELNI, misalnya, menunjukkan bahwa upaya integrasi aktivitas pelestarian laut ke dalam laporan keberlanjutan masih parsial, namun sudah mengarah pada klasifikasi “blue expenses” dan pemetaan indikator yang relevan dengan SDG 14, sehingga perusahaan dapat lebih transparan mengenai kontribusinya terhadap konservasi laut (Junardi, 2025)

Sejumlah penelitian lain menekankan bahwa blue accounting tidak berhenti pada penyusunan angka, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengetahuan (knowledge creation) tentang laut yang memperkuat tata kelola sumber daya maritim yang adil dan berkelanjutan (Abreu *et al.*, 2019). Dengan memadukan konsep natural capital accounting, full-cost accounting, dan perspektif keadilan sosial, blue accounting mendorong perusahaan dan pemerintah untuk melihat kembali siapa yang menanggung beban ekologis dan siapa yang menikmati manfaat ekonomi dari pemanfaatan laut, sehingga membuka ruang bagi desain kebijakan yang lebih dialogis dan partisipatoris di wilayah pesisir.

Dalam konteks Indonesia yang bercirikan negara kepulauan, pengembangan kerangka blue accounting juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur data, rendahnya literasi akuntansi lingkungan di komunitas pesisir, dan belum seragamnya standar pelaporan yang spesifik untuk sektor maritim. Namun berbagai studi mengenai penerapan blue accounting di kawasan ekonomi maritim, pariwisata bahari, dan perusahaan perikanan menunjukkan bahwa kerangka ini berpotensi menjadi alat penting untuk menjembatani kepentingan ekonomi, konservasi ekosistem, dan penguatan posisi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan (Alfiana, 2025).

Kearifan Lokal Kepulauan Maluku: Sasi Laut, Komunitas Adat, dan Nilai Spiritual

Kearifan lokal di Kepulauan Maluku tercermin kuat dalam praktik sasi laut, yaitu sistem pengelolaan sumber daya secara adat melalui mekanisme buka-tutup pemanfaatan hasil laut pada wilayah tertentu untuk menjaga keberlanjutan ekosistem (Muin and Rakuasa, 2023). Penelitian (Gultom, 2020) menunjukkan bahwa sasi merupakan bentuk manajemen sumber daya berbasis komunitas yang telah berlangsung sejak abad ke-17 dan terbukti efektif mengatur akses, menahan eksploitasi berlebihan, serta menjaga keberagaman hayati di kawasan pesisir dan perairan. Dalam praktiknya, sasi diatur melalui kesepakatan adat, peran tokoh agama dan tokoh adat, serta sanksi sosial yang memperkuat kepatuhan komunitas, sehingga memberikan kerangka tata kelola yang sejalan dengan prinsip konservasi modern.

Selain sasi, pengelolaan komunitas adat di Maluku juga ditopang oleh ikatan sosial seperti pela gandong dan struktur negeri adat yang menanamkan tanggung jawab kolektif terhadap laut sebagai ruang hidup bersama. Relasi spiritual masyarakat Maluku dengan laut tercermin dalam pandangan bahwa laut bukan sekadar objek eksploitasi, melainkan bagian dari kehidupan dan anugerah ilahi yang harus diperlakukan dengan hormat dan dijaga keseimbangannya. Studi etika ekologi atas tradisi sasi menegaskan bahwa laut dipahami sebagai “subjek” yang memiliki martabat, sehingga tindakan manusia harus mempertimbangkan harmoni kosmis, bukan sekadar kepentingan ekonomi jangka pendek (Haq *et al.*, 2025). Perspektif ini menjadikan kearifan lokal Maluku sebagai sumber nilai normatif yang dapat menopang desain kebijakan pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan.

Kajian Filosofis: Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis

Kajian filosofis dalam penelitian ini dapat dijabarkan melalui tiga dimensi utama, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis, yang saling terkait dalam membangun paradigma blue accounting berbasis kearifan lokal Kepulauan Maluku. Secara ontologis, relasi manusia-laut di Maluku dipahami bukan sebagai hubungan subjek dan objek yang eksploitatif, melainkan sebagai jejaring keberadaan yang menyatukan manusia, laut, dan seluruh kehidupan di dalamnya sebagai satu kesatuan kosmis yang saling bergantung. Laut tidak sekadar diposisikan sebagai sumber daya atau aset ekonomi yang dapat diukur dalam satuan moneter, tetapi sebagai ruang hidup yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekologis, sehingga keberadaannya mengandaikan kewajiban moral untuk menjaga keseimbangan dan kelestariannya antargenerasi. Cara pandang ontologis ini menuntut pergeseran paradigma akuntansi dari sekadar pengukuran nilai tambah ekonomi menjadi pengakuan atas keberadaan laut sebagai entitas yang layak dihormati dan dilindungi dalam setiap praktik pengelolaan dan pelaporan.

Secara epistemologis, pengetahuan mengenai laut dan pengelolaannya di Maluku berakar pada pengalaman kolektif yang panjang, tradisi lisan, dan pengamatan empiris yang terinternalisasi dalam praktik adat seperti sasi laut, pembagian ruang tangkap, dan penentuan musim tangkap. Pengetahuan tradisional ini berfungsi sebagai “sistem informasi lokal” yang memandu masyarakat dalam menentukan kapan laut harus “diistirahatkan”, area mana yang harus dilindungi, serta bagaimana distribusi hasil laut dilakukan secara adil antar anggota komunitas. Dalam kerangka blue accounting, epistemologi lokal ini dapat diintegrasikan sebagai sumber data dan indikator non-keuangan yang memperkaya laporan, misalnya melalui pengungkapan naratif tentang kondisi ekosistem, tingkat kepatuhan terhadap aturan adat, atau dinamika sosial yang menyertai praktik sasi, sehingga laporan tidak hanya bertumpu pada angka, tetapi juga pada pengetahuan kontekstual yang dimiliki komunitas.

Pada dimensi aksiologis, kearifan lokal Maluku memuat nilai-nilai moral yang menjadi dasar etika keberlanjutan, seperti tanggung jawab kolektif, keadilan antargenerasi, kesakralan laut, solidaritas, dan moderasi dalam mengambil hasil laut. Tradisi sasi, misalnya, mengajarkan pentingnya menahan diri dari eksploitasi berlebihan demi menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi berikut, sehingga praktik ekonomi didasarkan pada prinsip cukup, bukan serakah. Nilai-nilai ini dapat diterjemahkan ke dalam desain blue accounting melalui pemilihan indikator, kebijakan internal, dan format pengungkapan yang menekankan akuntabilitas ekologis dan sosial, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap regulasi. Dengan demikian, dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis bersinergi membentuk fondasi filosofis bagi paradigma blue accounting yang berakar pada kearifan lokal Maluku dan mendorong praktik bisnis laut yang lebih adil, beretika, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan orientasi reflektif-filosofis untuk membangun paradigma blue accounting berbasis kearifan lokal Kepulauan Maluku. Pendekatan ini menempatkan blue accounting bukan sekadar teknik pengukuran dan pelaporan, tetapi sebagai konstruksi pengetahuan yang berakar pada asumsi ontologis, epistemologis, dan aksiologis tertentu dalam akuntansi dan budaya lokal (Ganis Sukoharsono, 2023). Paradigma yang digunakan adalah paradigma interpretif dengan nuansa spiritual, yang memandang realitas sosial akuntansi sebagai hasil penafsiran pelaku dan tidak netral akan nilai. Paradigma interpretif dalam riset akuntansi memungkinkan eksplorasi makna, simbol, dan nilai yang melekat dalam praktik serta wacana akuntansi, termasuk ketika dikaitkan dengan dimensi etis dan spiritual (Nugrahanti, 2018).

Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis secara kuantitatif, tetapi mengonstruksi kerangka konseptual blue accounting yang bersandar pada filosofi ilmu akuntansi dan kearifan lokal bahari Maluku. Desain penelitian memadukan kajian konseptual tentang filosofi akuntansi (ontologi, epistemologi, aksiologi) dan blue accounting dengan kajian konteks kultural Maluku seperti sasi laut serta pandangan kosmologis terhadap laut sebagai basis refleksi. Model seperti ini sejalan dengan tren penelitian akuntansi yang menggunakan pembacaan filosofis untuk mengkritik sifat materialistik dan value-free akuntansi arus utama dan menawarkan fondasi etisspiritual alternatif (Wahdi et al., 2025).

Dalam mengartikulasikan keterkaitan tersebut secara lebih dalam, peneliti menggunakan refleksi filosofis yang mencakup dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari relasi masyarakat Maluku dengan laut. Secara ontologis, laut tidak sekadar dipandang sebagai objek ekonomi, tetapi sebagai ruang hidup dan entitas yang memiliki kedudukan khusus dalam kosmologi lokal; secara epistemologis, pengetahuan tentang musim, zona tangkap, dan tata kelola sumber daya dikonstruksi melalui pengalaman kolektif, ritus adat, dan narasi turun-temurun; secara aksiologis, nilai-nilai seperti moderasi pemanfaatan, keadilan antar generasi, dan tanggung jawab komunal menjadi dasar pengambilan keputusan. Pendekatan filosofis ini memberikan dasar untuk merumuskan conceptual framework blue accounting berbasis kearifan lokal yang memposisikan akuntansi sebagai praktik kultural dan etis, bukan semata teknik pencatatan, sehingga membuka ruang bagi pengakuan atas laut dan komunitas pesisir sebagai subjek moral dalam sistem pelaporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lukisan Laut Sebagai Nadi Kehidupan

Laut sebagai nadi kehidupan bukan hanya metafora bagi keberlanjutan ekosistem, tetapi juga merupakan cerminan dari hubungan antara manusia dan alam yang saling bergantung satu sama lain. Penelitian ini berpijak pada paradigma akuntansi sosial lingkungan yang memandang akuntansi sebagai praktik sosial yang tidak bebas nilai (*value laden practice*). Dalam perspektif ini, akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme akuntabilitas sosial dan ekologis yang dipengaruhi oleh konteks budaya dan relasi kuasa di dalam masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan literatur *critical dan interpretive accounting* yang menekankan pentingnya konteks lokal dalam membangun sistem akuntansi berkelanjutan. Dalam konteks kelautan, *blue accounting* berkembang sebagai respon atas keterbatasan akuntansi konvensional dalam merepresentasikan nilai ekosistem laut dan relasi sosial masyarakat pesisir. Namun, sebagian besar studi *blue accounting* masih berorientasi teknokratis dan berbasis indikator global, sehingga berpotensi mengabaikan sistem nilai lokal yang telah lama mengatur praktik keberlanjutan secara organik.

Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam kosmologi Maluku, laut dipahami sebagai ruang hidup yang menyatukan dimensi ekonomi, sosial, spiritual, dan ekologis, sehingga tidak dapat direduksi menjadi sekadar aset yang dinilai dalam satuan moneter. Perspektif ini selaras dengan kecenderungan baru dalam akuntansi lingkungan dan *blue economy* yang menempatkan ekosistem laut sebagai modal alam (*natural capital*) yang mengandung hak moral untuk dilindungi dan dipulihkan lintas generasi. Konsekuensinya, paradigma *blue accounting* bernafaskan kearifan laut Maluku menggeser fokus dari pelaporan laba dan biaya ke pengakuan atas keberlanjutan ekosistem, beban ekologis, dan distribusi manfaat di antara komunitas pesisir. Laut diposisikan sebagai “pemangku kepentingan diam” (*silent stakeholder*) yang harus diwakili melalui indikator ekologis dan narasi kualitatif dalam laporan, sehingga praktik akuntansi menjadi medium pertanggungjawaban etis terhadap laut, bukan sekadar mekanisme pemenuhan regulasi.

Jejak Kearifan Dalam Riak Tradisi

Temuan (Wattimena *et al.*, 2025) mengungkap bahwa sasi berfungsi sebagai mekanisme adat buka tutup pemanfaatan sumber daya laut yang memadukan aturan normatif, pengawasan sosial, dan keyakinan spiritual untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam perspektif akuntansi, sasi dapat dipahami sebagai “arsip ekologis hidup” yang mengatur waktu panen, pembagian hasil, dan batas eksploitasi, sehingga mengandung struktur informasi yang potensial diterjemahkan menjadi indikator *blue accounting*. Penelitian (Layn, 2024) juga menunjukkan bahwa integrasi prinsip sasi ke dalam *green/blue accounting* dapat memperkaya dimensi pelaporan keberlanjutan dengan menambahkan indikator kepatuhan adat, masa “istirahat” ekosistem, dan pola pemulihan sumber daya. Pendekatan ini membuka peluang untuk memformalkan logika “cukup, bukan serakah” dalam struktur laporan, sehingga praktik ekonomi pesisir tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari keselarasan dengan ritme ekologis laut.

Selain sasi, hasil analisis menemukan bahwa *pela gandong* sebagai ikatan persaudaraan lintas komunitas memberikan basis etika bagi pembentukan solidaritas ekologis di wilayah pesisir Maluku. Nilai saling menanggung dan saling menjaga yang tertanam dalam *pela gandong* berpotensi menjadi prinsip normatif bagi desain akuntabilitas regional, terutama ketika dampak kerusakan laut menyebar melampaui batas administratif satu negeri atau desa. Dalam kerangka *blue accounting*, *pela gandong* dapat diartikulasikan sebagai fondasi indikator kolaboratif antar-komunitas di Maluku, seperti kesepakatan

bersama untuk zona lindung pesisir, pembagian akses tangkap ikan yang merata, serta mekanisme bagi hasil yang transparan dan adil. Nilai persaudaraan lintas desa ini mengubah pelaporan dari sekadar catatan entitas individu menjadi gambaran holistik tentang jejaring tanggung jawab sosial-ekologis yang terikat historis dan moral. Pendekatan ini membuat blue accounting lebih hidup, karena tidak hanya menghitung biaya restorasi atau pendapatan perikanan, tapi juga mengukur kekuatan ikatan budaya dalam menjaga keseimbangan laut.

Penerapan *pela gandong* dalam blue accounting memperkaya tata kelola maritim dengan prinsip solidaritas yang melampaui batas administratif, di mana komunitas saling menjaga wilayah pesisir seperti saudara sendiri, sehingga mencegah overeksploitasi sumber daya. Misalnya penelitian (Sathiyamoorthy and Sakurai, 2024) yang mengungkapkan kesepakatan zona lindung bisa menjadi indikator utama dalam laporan, mencatat kontribusi kolektif seperti patroli bersama atau restorasi mangrove, yang pada akhirnya meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap perubahan iklim. Hal ini selaras dengan strategi blue economy di wilayah Maluku Utara, di mana kolaborasi komunitas menjadi kunci keberlanjutan ekonomi pesisir. Laporan blue accounting berbasis *pela gandong* memungkinkan pemantauan dampak ekologis secara regional, seperti penurunan polusi laut atau peningkatan stok ikan, sambil menyoroti manfaat sosial seperti pemberdayaan perempuan pesisir dalam pengelolaan hasil tangkapan. Jejaring tanggung jawab ini tidak hanya normatif, tapi juga praktis, karena mendorong transparansi bagi hasil yang adil antar-komunitas, sehingga memperkuat posisi masyarakat lokal dalam negosiasi dengan pelaku usaha besar. Pendekatan ini membuka peluang integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan nasional blue economy, menjadikan Maluku sebagai model akuntabilitas berkelanjutan.

Menyelam ke Dasar Filsafat Laut

Ontologi, dalam filsafat, berfokus pada hakikat eksistensi dan bagaimana suatu entitas berhubungan dengan dunia sekitarnya. Dalam konteks *blue accounting* di Kepulauan Maluku, pemahaman ontologis ini menuntut kita untuk melihat laut sebagai lebih dari sekadar ruang fisik atau objek eksploitasi sumber daya alam. Laut, dalam pandangan masyarakat Maluku, adalah entitas yang memiliki eksistensi kosmis, menghubungkan manusia dengan alam dan dunia spiritual. Pandangan ini tertanam dalam praktik adat seperti Sasi dan Pela Gandong, yang tidak hanya berfungsi untuk mengatur pengambilan hasil laut tetapi juga untuk menjaga hubungan yang harmonis antara manusia, laut, dan dunia spiritual. Laut bukanlah objek yang bisa dilihat dari sudut pandang materialisme ekonomi semata, melainkan sebagai subjek yang berhak dihormati dan dijaga. Adat Sasi mengajarkan bahwa laut adalah entitas yang memerlukan pengelolaan dengan penuh tanggung jawab, di mana larangan mengambil hasil laut pada waktu tertentu bukan hanya bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap kehidupan laut yang dianggap memiliki jiwa. Sasi menjadi sarana untuk menjaga kelestarian laut, sambil menegaskan bahwa manusia tidak memiliki hak mutlak untuk mengeksploitasi alam. Sebagai bagian dari ontologi budaya Maluku, laut adalah entitas yang harus diperlakukan dengan kehati-hatian, yang mengajarkan nilai keterhubungan antara manusia dan alam. Dalam konteks *blue accounting*, hal ini mengarahkan pada perlunya pengakuan terhadap laut sebagai ruang hidup kolektif yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat pesisir, bukan hanya sebagai objek yang dapat dihitung dan dikuasai.

Di tingkat epistemologis, *blue accounting* harus memahami bahwa pengetahuan lokal yang berkembang di masyarakat pesisir Kepulauan Maluku merupakan sistem informasi yang sangat kaya dan berbasis pada pengalaman serta pengamatan jangka panjang terhadap ekosistem laut. Pengetahuan ini, yang dikodifikasikan dalam aturan adat seperti Sasi,

mencakup pola musiman, zona tangkap, dan teknik berburu atau memancing yang ramah lingkungan. Namun, yang lebih mendalam adalah pengetahuan tentang interaksi antar elemen alam dari ikan, terumbu karang, hingga hubungan manusia dengan alam. Ini merupakan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun, sering kali tidak tercatat dalam dokumen formal atau statistik, tetapi memiliki fungsi vital dalam mengelola dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Sebagai contoh, Sasi mengatur kapan dan di mana hasil laut boleh diambil, yang bersifat temporer dan terarah untuk memastikan bahwa siklus ekosistem tetap terjaga. Pengetahuan lokal ini bukan sekadar informasi praktis, melainkan juga merupakan sistem informasi yang mengandung filosofi yang mendalam bahwa pengambilan hasil alam harus dilakukan dengan penghormatan dan kesadaran bahwa alam memiliki batasan dan keutuhan yang harus dijaga. Dalam perspektif epistemologi *blue accounting*, pengetahuan lokal ini harus diakui dan dipertimbangkan dalam laporan dan analisis, bukan hanya sebagai bagian dari tradisi, tetapi sebagai indikator non-keuangan yang vital untuk menjaga keberlanjutan. Oleh karena itu, *blue accounting* yang berfokus pada Kepulauan Maluku harus mencakup lebih dari sekadar angka dan statistik tetapi juga integrasi pengetahuan lokal yang berbasis pada interaksi ekologis dan kearifan budaya yang menjaga hubungan manusia dengan laut.

Lain halnya pada dimensi aksiologis, *blue accounting* di Kepulauan Maluku harus mempertimbangkan nilai-nilai yang mendasari hubungan masyarakat dengan laut. Aksiologi, yang berkaitan dengan studi tentang nilai dan etika, menuntut bahwa pengelolaan sumber daya laut tidak hanya dilihat dari sisi ekonomis atau ekologis, tetapi juga dari perspektif moral dan spiritual. Dalam praktik adat Sasi, nilai moderasi mengajarkan bahwa pengambilan hasil laut harus dilakukan dengan cara yang mempertimbangkan keseimbangan ekosistem. Praktik ini melibatkan siklus alam yang harus dihormati, di mana penangkapan ikan atau pengambilan hasil laut hanya dilakukan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tidak merusak sumber daya tersebut. Prinsip moderasi ini mengarahkan pengelolaan sumber daya laut menuju keberlanjutan, yang menghindari eksploitasi berlebihan. Nilai keadilan antargenerasi dalam *blue accounting* di Kepulauan Maluku juga mengingatkan kita untuk mempertimbangkan dampak keputusan kita terhadap generasi mendatang. Dalam sasi, masyarakat mengatur waktu dan cara pengambilan hasil laut dengan mempertimbangkan bahwa ekosistem harus tetap sehat untuk diwariskan kepada anak cucu. Hal ini mencerminkan pemahaman mendalam tentang keadilan yang melampaui kebutuhan sesaat dan memprioritaskan kelangsungan hidup jangka panjang bagi seluruh makhluk hidup yang bergantung pada laut. Sementara itu, kesakralan laut menjadi prinsip etika yang sangat penting dalam budaya Maluku, yang menegaskan bahwa laut adalah tempat yang suci dan harus dihormati sebagai bagian dari hidup dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dalam praktik *blue accounting*, kesakralan laut ini harus tercermin dalam kebijakan dan keputusan yang diambil, sehingga sistem akuntansi ini tidak hanya berbicara tentang kerugian atau keuntungan ekonomi, tetapi juga tentang penghormatan terhadap alam dan kelestarian yang dihormati oleh masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan Dan Saran

Penelitian ini menegaskan bahwa *blue accounting* tidak hanya perlu berfungsi sebagai alat pengukuran ekonomi semata, tetapi juga harus memperhitungkan dimensi sosial, ekologis, dan kultural yang menghubungkan manusia dengan laut. Dalam konteks Kepulauan Maluku, pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dapat dicapai dengan

mengintegrasikan nilai-nilai ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang tertanam dalam kearifan lokal, seperti adat Sasi dan Pela Gandong. Laut, dalam pandangan masyarakat Maluku, adalah entitas yang tidak hanya dimanfaatkan secara ekonomis, tetapi juga dihormati dan dipertahankan keseimbangannya melalui praktik adat yang mengedepankan keberlanjutan. Oleh karena itu, *blue accounting* yang berbasis pada kearifan lokal ini berfungsi sebagai jembatan antara aspek ekonomi, sosial, dan spiritual dalam pelaporan sumber daya kelautan, sehingga mampu menghadirkan laporan yang lebih holistik dan adil.

Sebagai langkah lanjutan, penelitian ini menyarankan perlunya penelitian lebih lanjut yang menguji penerapan *blue accounting* berbasis kearifan lokal di Kepulauan Maluku melalui pendekatan empiris. Hal ini akan memberikan bukti nyata mengenai efektivitas dan tantangan dalam mengimplementasikan paradigma ini dalam praktek sehari-hari. Selain itu, pengembangan indikator berbasis adat dan budaya, seperti Sasi dan Pela Gandong, perlu didorong agar dapat diadaptasi ke dalam sistem pelaporan yang lebih formal, yang dapat digunakan oleh pemerintah dan masyarakat pesisir untuk memperkuat keberlanjutan ekosistem laut. Terakhir, penting untuk memperluas pemahaman tentang bagaimana *blue accounting* dapat menggabungkan nilai-nilai lokal dalam kebijakan nasional dan internasional, dengan menekankan pentingnya dialog antara ilmu akuntansi, kebijakan publik, dan kearifan lokal dalam mencapai pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abreu, R., David, F., Santos, L.L., Segura, L. and Formigoni, H. (2019), "Blue Accounting: Looking for a New Standard."
- Alfiana, M. (2025). Analisis implementasi blue accounting pada perusahaan perikanan di Indonesia.
- Amaliah, T. H., Badu, R. S., Kanon, J., & Usman, K. (2024). Bagaimana praktik dan makna blue accounting bagi bisnis wisata di Teluk Tomini dalam studi etnometodologi? *Wahana Riset Akuntansi*, 12(1), 49–62. <https://doi.org/10.24036/wra.v12i1.1251>
- Boswell, R. (2023). Prioritizing the culture metric for transformative ocean management in South Africa. *Ecosystems and People*, 19(1). <https://doi.org/10.1080/26395916.2023.2260492>
- Gultom, E. (2020). Kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam mewujudkan kedaulatan pangan di tengah pandemi COVID-19.
- Haq, I., Sudirman, L., & Amiruddin, M. M. (2025). Eco-theological insights on the Sasi tradition: Analyzing environmental ethics and sanctions through fiqh al-bi'ah and Islamic criminal law. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 58–80. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.9412>
- Hendarman, A. F., Pritasari, A., Desiana, N., Astiri, S., Dwifani, D., Sonia, V., Kumarasakti, R. P., et al. (2024). Current research and future perspectives: A literature review on the blue economy of Indonesia. *BIO Web of Conferences*, 92, 01030. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20249201030>

- Junardi. (2025). Integrasi sustainable development goal melalui praktik blue accounting pada PT Pelni (Persero). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 9(3).
- Layn, Y. Y. (2024a). The local wisdom of the Sasi culture and green accounting (A qualitative approach from a sustainability perspective in Maluku Province). *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(6), 2337–2348. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i6.2949>
- Muin, A., & Rakuasa, H. (2023). Sasi laut as a culture of natural resources conservation to overcome the tragedy of the commons in Maluku Province. *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science*, 1(3), 277–287. <https://doi.org/10.59653/ijmars.v1i03.139>
- Noya, E. V. (2023). Sasi labuang (petuanan negeri) sebagai bentuk perlindungan terhadap biota laut di negeri adat. *BAMETI Customary Law Review*, 1(2), 83–93. <https://doi.org/10.47268/bameti.v1i2.11175>
- Nugrahanti, Y. W. (2018). Reflection of philosophical basis in financial accounting research. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 6(1).
- Rahmayanti, A. Y., & Sari, D. K. (2023). Blue accounting to enhance the quality of sustainability report. *Proceedings*, 69. <https://doi.org/10.3390/proceedings2022083069>
- Robert Tambun, Sutrisno, & Prasutiyon, H. (2025). Sustainable blue economy establishes social justice based on ecology, preserves local wisdom, environmental and marine conservation as the future. *International Journal of Integrative Sciences*, 4(2), 493–504. <https://doi.org/10.55927/ijis.v4i2.88>
- Sathiyamoorthy, S., & Sakurai, T. (2024). Effectiveness of community participation in mangrove restoration: The evidence from northern Sri Lanka. *Environmental Economics and Policy Studies*, 26(4), 759–779. <https://doi.org/10.1007/s10018-024-00397-1>
- Soselisa, P. S., Alhamid, R., & Rahanra, I. Y. (2024). Integration of local wisdom and modern policies: The role of traditional village government in the implementation of Sasi in Maluku. *Baileo: Jurnal Sosial Humaniora*, 2(1), 63–75. <https://doi.org/10.30598/baileofisipvol2iss1pp63-75>
- Sukoharsono, E. G. (2023). Constructing philosophy of accounting: Focusing on axiology. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 31.
- Syah, S., Saraswati, E., & Sukoharsono, E. G. (2020). Blue accounting and sustainability.
- Wahdi, N., Gusmao, C., Amaral, A. S., & Santoso, A. (2025). *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 20(2).
- Wakano, A. (2019). Nilai-nilai pendidikan multikultural dalam kearifan lokal masyarakat Maluku (Vol. 4).

Wattimena, A. K., Iffatin, I. N., & Anshor, A. M. (2025). Adat Sasi in the concept of local economic democracy in Maluku. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 4(8), 3951–3964. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i8.399>